

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Bastian merupakan suatu tingkat keberhasilan organisasi, kegiatan maupun program dalam mencapai tujuan yang ada. Keberhasilan yang dicapai ini merupakan perbandingan antara *output* dengan tujuan. Efektivitas dalam mencapai tujuan dapat dikatakan berhasil dilihat dari seberapa jauh organisasi, kegiatan maupun program berjalan secara efektif.¹⁴

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk

¹⁴ Asnawi, 2013, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hal. 6.

mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.¹⁵

Terdapat beberapa pendapat lain mengenai teori keefektifan, yakni:¹⁶

- a. Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasaran dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.
- b. Abdurrahmat (2003:92) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
- c. Hidayat yang menjelaskan bahwa: Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

¹⁵ <http://eprints.umm.ac.id/35927/3/jiptumpp-gdl-danisuhend-48876-3-babii.pdf>, diakses pada tanggal 08/02/2020 pukul 11.45, hal. 18.

¹⁶ <http://digilib.uinsby.ac.id/11139/5/bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 08/02/2020 pukul 11.52, hal. 17-18.

- d. Heinz Wehrich dan Harold Koontz mendefinisikan efektif adalah pencapaian sebuah tujuan. dan menurut Peter Drucker mendefinisikan efektif adalah melakukan hal yang benar.
- e. Prasetyo Budi Saksone adalah: Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Sehingga dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya.

2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu elemen yang perlu diperhatikan dalam sebuah tujuan. Dimana tujuan akan menentukan arah kemana program dilaksanakan, sedangkan efektivitas merupakan seberapa berhasil arah tersebut dalam dilaksanakan. Dalam sebuah organisasi, kegiatan maupun program kedua hal tersebut sangat perlu diperhatikan terkhusus ketika tujuan tertuju pada masyarakat luas. Sehingga dalam memperhatikan tingkat keefektivitasan program perlu dilakukan sebuah pengukuran yang kompleks.

Pengukuran merupakan suatu kegiatan yang akan menentukan berhasil atau tidaknya sesuatu yang telah dilakukan, termasuk untuk mengukur apakah kegiatan tersebut telah mencapai keefektivitas atau belum. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja

yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Gibson dalam mengukur efektivitas dapat dilihat dari beberapa elemen, yaitu:¹⁷

a. Kepuasan kerja

Kepuasan kerja tertuju pada subyek terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Kepuasan kerja diukur dari kesesuaian dan kemampuan yang dimiliki oleh subyek tersebut. Sehingga dengan adanya kesesuaian kemampuan seorang pekerja, maka mereka akan puas dan tidak terkendali oleh pekerjaan yang dilakukan tersebut.

b. Produktivitas

Produktivitas merefleksikan hubungan antara input dan output. Setiap instansi memiliki input dan output yang perlu disesuaikan dalam misi dan tujuan organisasi.

c. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu aspek yang mengacu kepada hematnya atau meringkasnya biaya yang terjadi dalam pencapaian hasil.

¹⁷ Mukhtar, *Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 30-31.

d. Kemampuan beradaptasi

Kemampuan beradaptasi merupakan suatu hal yang terjadi pada suatu organisasi, khususnya pada manajemen organisasi dalam merespon perubahan yang terjadi secara internal maupun eksternal.

e. Pengembangan

Pengembangan yang dimaksud adalah tertuju pada perubahan kapasitas yang terjadi dalam organisasi tersebut, baik terhadap organisasi maupun pekerjanya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi, yaitu:¹⁸

a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran (output).

¹⁸ <http://eprints.umm.ac.id/35927/3/jiptumpp-gdl-danisuhend-48876-3-babii.pdf>, diakses pada tanggal 08/02/2020 pukul 11.45, hal. 23-26.

b. Karakteristik Lingkungan

Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut sedikit berbeda, namun saling berhubungan. Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Pengaruh faktor semacam ini terhadap dinamika organisasi pada umumnya dianggap meliputi derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat ketidak pastian lingkungan. Sedangkan lingkungan dalam yang pada umumnya disebut iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual. Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

c. Karakteristik Pekerja

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan

dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

d. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Secara umum, para pemimpin memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditunjukkan kearah sasaran. Kewajiban mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar tujuan dan sasaran organisasi. Peranan pemimpin ini mungkin merupakan fungsi yang paling penting. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.

4. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:¹⁹

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para omplementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

¹⁹ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 77.

- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih tetap perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat. Hal ini dilakukan agar para pekerja mampu mengetahui tindakan apa yang perlu dilakukan sesuai dengan pedoman program.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, dengan adanya sarana dan prasara kerja ini maka para pekerja mampu bekerja secara produktif.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, suatu program yang baik adalah program yang bekerja secara efektif dan efisien. Pada dasarnya program yang efektif dan efisien menunjukkan bahwa organisasi mencapai sasaran dengan tepat.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian, hal ini harus yang bersifat mendidik sebab manusia dalam melakukan sesuatu selalu terlibat pada kesalahan.

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “*Efektivitas Organisasi*” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut.²⁰

²⁰ Steers, M. Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1995), hal. 53.

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Dalam pencapaian tujuan ini diperlukan suatu pentahapan agar dapat terjamin pencapaiannya. Pencapaian tujuan ini terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian program yang ada.

B. Konsep Pendampingan

1. Pengertian Pendampingan

Pendampingan menurut penjelasan Direktorat Bantuan Sosial merupakan kegiatan yang dilakukan dan diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan dengan penuh tanggung jawab dalam

memecahkan suatu permasalahan sehingga akan mampu mendorong terciptanya kemandirian pada pihak tersebut.²¹

Pendampingan merupakan suatu strategi yang biasanya dilakukan oleh suatu pihak dalam menciptakan kemandirian pihak lain. Pendampingan ini juga biasa disebut dengan strategi pemberdayaan. Sebab hal ini biasanya dapat tertuju pada perbaikan suatu manajemen maupun perbaikan pada bidang usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Pendampingan dapat dilakukan dengan berbagai cara agar dapat tercipta suatu perubahan yang positif. Pendampingan sebagai strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui:

a. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Tindakan ini tertuju pada peran suatu pihak menjadi pendidik. Dimana suatu pihak akan berperan aktif dalam memberikan masukan yang didasarkan pada pengetahuan maupun pengalamannya. Kesadaran merupakan suatu yang harus ada pada setiap pelaku, dimana ketika kesadarannya tinggi maka mereka akan segan dalam melakukan suatu tindakan atau perubahan tersebut. Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui pemasyarakatan dan pendidikan. Sedangkan dalam meningkatkan kemampuan serta ketrampilan ini dikembangkan dengan cara pendampingan langsung secara partisipatif.

²¹ Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan trauma center*, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007), hal. 4.

b. Mobilisasi sumber modal

Tindakan ini tertuju pada peran suatu pihak menjadi fasilitator. Sebab hal ini suatu pihak akan menjadi satu-satunya pengarah terhadap terciptanya perubahan. Sumber modal biasanya diberikan kepada suatu pihak yang berkebutuhan dalam hal menunjang suatu usaha yang dilakukan. Biasanya ini dilakukan dengan penghimpunan melalui tabungan dan disalurkan secara sosial berkelompok.

2. Tujuan Pendampingan

Tujuan adalah sasaran akhir/arah aktivitas organisasi perusahaan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan.²²

- a. Memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi dilingkungan tersebut
- b. Memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menggabungkan kepercayaan dan kemampuan dalam menangani masalah

Pendampingan dilakukan untuk membantu sebuah kelompok dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi tetapi sepenuhnya pendampingan ini dilakukan bukan untuk menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Tetapi dalam hal ini pendampingan dilakukan dengan mencari alternatif pemecahan masalah secara bersama-sama.

Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Dan kelompok pendamping dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk

²² Ida Nuraida, *Manajemen Administrasi Perkantoran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hal. 17.

diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut positif terhadap kelompoknya.

Dalam hal ini suatu pendampingan yang tercipta secara baik, maka akan dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran agama islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan oleh agama islam bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya.

Ayat-ayat al-qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersirat) dan ada yang secara tidak langsung (tersurat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi, namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

Seperti dijelaskan dalam Qs. An-Nahl: 97, sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya

kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah SWT juga akan membalasa berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.²³

3. Peran Pendampingan

Pendampingan sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup dua peran utama, yaitu:²⁴

- a. Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negoisasi, memberi dukungan, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
- b. Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran

²³Satika Rani, <http://repository.radenintan.ac.id/3915/1/SKRIPSI%20SATIKA.pdf>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 15.09.

²⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 200.

masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

Menurut Suharto, pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam 4P, yakni:²⁵

a. Pemungkinan (*Enabling*) atau Fasilitasi

Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.

Fungsi ini akan memberikan langkah penuh kepada suatu lembaga terhadap lembaga atau obyek yang ditujunya untuk memberikan manajemen sumber yang ada. Manajemen sumber tersebut dapat berasal dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga. Dimana yang terpenting adalah bahwa manajemen sumber tersebut dapat memecahkan suatu masalah yang ada.

b. Penguatan (*Empowering*)

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan

²⁵*Ibid.*, Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, ... , hal. 95-97.

dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan.

Semua pertukaran informasi pada dasarnya merupakan bentuk pendidikan. Sebagai fungsi dalam pendampingan sosial, pendidikan lebih menunjuk pada sebuah proses kegiatan, ketimbang sebagai sebuah hasil dari suatu kegiatan.

c. Perlindungan (*Protecting*)

Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

Fungsi perlindungan ini merupakan fungsi yang dapat membantu masyarakat yang didampingi untuk memperoleh jaringan-jaringan kerja yang nantinya mampu menyokong kegiatan yang sedang masyarakat jalankan, misalnya adalah ketika masyarakat yang didampingi memiliki sebuah usaha, maka fungsi pendudukan ini akan berperan untuk menemukan sebuah relasi kerja yang mampu memperlancar kegiatan usaha tersebut.

d. Pendukungan (*Supporting*)

Pendukungan ini merupakan fungsi yang mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendukungan ini merupakan suatu bentuk monitoring atau evaluasi terhadap proses pendampingan yang dilakukan oleh suatu lembaga kepada lembaga lain yang didampinginya. Dalam hal ini pendukungan ini lebih bersifat evaluatif terhadap suatu proses atau program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sehingga dengan adanya pendukungan ini maka suatu proses pendampingan akan mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang didampingi.

C. Konsep Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu cara, proses, dan tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan melakukan kegiatan bina untuk menciptakan suatu tindakan atau kegiatan yang berdaya guna untuk kedepannya. Dalam kegiatan pembinaan ini selalu terdapat perencanaan serta pengorganisasian yang dilakukan oleh suatu pihak demi menciptakan kegiatan pembinaan yang teratur dan terarah.²⁶

Pembinaan juga dapat diartikan: “bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain

²⁶ Masdar Helmi, *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*, (Semarang: Toha Putra, 1973).

melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan".²⁷

Dalam ilmu sehari-hari, kegiatan pembinaan ini sering dikaitkan dengan perbantuan suatu pihak kepada pihak lain untuk menuju terselenggaranya kegiatan yang dilakukan pihak tersebut. Pembinaan ini dilakukan secara teratur dan terorganisir, ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang mampu mengubah atau mendayagunakan kemampuan yang ada.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan.

2. Tujuan Pembinaan

Pembinaan dapat dilakukan terhadap satu pihak maupun sekelompok pihak. Pembinaan ini akan memberikan suatu materi serta pengalaman yang dimiliki pihak pembina dalam rangka untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dari berbagai macam pihak. Dalam hal pembinaan ini terdapat beberapa tujuan yang melekat. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Mengembangkan keahlian bagi semua pihak
- b. Meningkatkan pengetahuan untuk proses pengambilan keputusan
- c. Menumbuhkan sikap kooperatif bagi semua pihak

Mathis juga mengemukakan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain:²⁸

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 144.

- a. Mengatur strategi. Yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus terus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
- b. Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan.
- c. Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan.
- d. Memberi pembenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan.

Sedangkan komponen-komponen pembinaan yang dijelaskan oleh Mangkunegara terdiri dari:²⁹

²⁸ Mathis dan Johnson. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hal. 307-308.

²⁹ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 76.

- a. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur
- b. Para pembina yang profesional
- c. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai
- d. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

D. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara etimologi berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang diartikan kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan sementara Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (KBBI). Dengan demikian, BUMDes merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem pemerintah yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat.

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan perencanaan dan

pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa.³⁰

Anom Surya Putra menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya:

- a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupanbermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangunIndonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desayang bersifat kolektif.
- c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkankualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.³¹

Maryuani mendefinisikan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi 2004), hal. 4.

³¹ Surya Anom Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 9.

memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.³²

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³³

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes.³⁴ Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja, BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:³⁵

a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.

³² Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), hal. 35.

³³ Herry Komroesid, *Tata Cra Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016), hal. 2.

³⁴ Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development*, Vol. V (1), Februari, 2014.

³⁵ *Ibid.*, Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, ..., hal. 51.

- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui pertanyaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budayalokal (*lokal wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luas, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Badan usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa Bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah.

Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut.

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersiapkan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:³⁶

- a. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrasi.

³⁶ Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hal. 13.

f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

Selain azaz pemberdayaan dan desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan berdasarkan:³⁷

- a. Azaz kesukarelaan, maksudnya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirusaknya.
- b. Azaz kesetaraan, maksudnya semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan.
- c. Azaz Musyawarah, maksudnya semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- d. Azaz Keterbukaan, dalam hal ini semua yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama lain.

³⁷ Chabib Sholeh, *Dialektika Pengembangan Dengan Pemberdayaan*, (Bandung: Bumi Aksara, 2014), hal. 83-84.

2. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Menumbuhkembangkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan sumber pendapatan Asli Desa.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Adapun Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- b. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa.
- c. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
- d. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan.³⁸

3. Unit Usaha BUMDes

Usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDes antara lain: Pasar desa, Waserda, Transportasi, home industri, perikanan darat, pertanian, simpan pinjam, sumber air, obyek wisata desa, kerajinan rakyat, peternakan, dan argoindustri.

³⁸ Purnomo, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Lombok Timur: Makalah BPMPD, 2004), hal. 17.

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di perdesaan. Oleh karena itu, didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha berbeda-beda. Ini sebagaimana ditunjukkan pada contoh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu Unit Perdagangan, Unit Jasa Keuangan, dan Unit Produksi. Unit usaha yang berada didalam BUMDes secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Unit jasa keuangan, misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
- b. Unit usaha sektor riil/ekonomi, misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waseda, foto copy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, dll.³⁹

E. Sentra Industri

1. Pengertian Sentra Industri

Dalam ekonomi mikro, industri dapat diartikan kumpulan perusahaan yang sejenis dan memproduksi barang-barang homogen serta memiliki substitusi yang erat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang perindustrian, yang dimaksud dengan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2007), hal. 27-28.

yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.⁴⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sentra industri merupakan suatu usaha manusia yang bersifat homogen yang bergerak di bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yang akan dapat dimanfaatkan nialinya oleh masyarakat luas.

2. Peran dan Fungsi Sentra Industri

Di Negara Indonesia, usaha kecil maupun menengah memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat. hal ini dikarenakan usaha kecil maupun menengah mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi jumlah pengangguran, dan yang pasti akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera.

Menurut Suryana, peran sentra industri diantaranya:⁴¹

- a. Memiliki potensi yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada industri kecil mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja apabila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha yang besar.
- b. Memiliki kemampuan guna memanfaatkan bahan baku daerah atau lokal, memegang peranan utama dalam hal pengadaan produk maupun jasa

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, *Perindustrian*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 2.

⁴¹ Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), Cet. ke-1, hal. 76.

untuk masyarakat serta secara langsung akan menunjang peningkatan pendapatan masyarakat dalam kegiatan usaha.

- c. Industri kecil relatif tidak memiliki utang usaha dalam jumlah yang besar.
- d. Industri kecil akan memberikan sumbangan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia yang terus meningkat.
- e. Industri mampu menumbuhkan usaha di daerah karena mampu menyerap tenaga kerja di daerah.
- f. Akhir-akhir ini di Indonesia peran industri kecil diharapkan sebagai salah satu sumber peningkatan ekspor non migas.

Selain peran di atas, ada beberapa fungsi sentra industri diantaranya:⁴²

- a. Usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha. Seperti, fungsi pemasok, produksi, penyalur, dan pemasaran bagi hasil produk industri besar. Usaha kecil berfungsi sebagai transformator antar sektor yang mempunyai kaitan ke depan maupun ke belakang.
- b. Usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Usaha kecil sangat fleksibel karena dapat menyerap tenaga kerja dan juga sumber daya lokal serta dapat meningkatkan sumber daya manusia agar dapat menjadi seorang wirausaha yang tangguh.

⁴²*Ibid.*, Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*, ..., hal. 77.

- c. Usaha kecil dipandang sebagai sarana perindustrian pendapatan nasional, alat pemerataan berusaha dan pendapatan karena jumlahnya tersebar diperkotaan maupun pedesaan.

3. Karakteristik Sentra Industri

Perkembangan industri kecil dan menengah di Indonesia itu tidak terlepas dari kegiatan investasi. Investasi yang telah dilakukan pada berbagai sektor industri tertentu pada umumnya memiliki daerah yang kondusif serta familier pada komoditas tertentu. Seperti halnya, ketika ada investor yang akan menanamkan modalnya di sektor industri kerupuk gadung, maka daerah yang dipilih itu sebaiknya Kabupaten Tulungagung karena memiliki keunggulan pada sektor industri tersebut dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya. Adapun beberapa karakteristik sentra industri diantaranya:⁴³

- a. Sejumlah perusahaan dalam skala yang sama pada umumnya membuat jenis produk yang sama atau sejenis dan lokasinya saling berdekatan satu sama lain dalam suatu wilayah.
- b. Fasilitas-fasilitas, terutama dari pemerintah mampu digunakan bersama oleh semua pengusaha yang ada pada lokasi tersebut.
- c. Suatu sentra mencerminkan keahlian yang sama atau seragam dari penduduk di wilayah tersebut, yang sudah dimiliki sejak lama, serta turun-temurun.

⁴³ Ahmad Subagyo, *Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), Cet. ke-1, hal. 50.

- d. Adanya kerja sama diantara sentra sesama pengusaha. Misalnya, dalam hal pengadaan bahan baku maupun dalam hal pemasaran.
- e. Walaupun tidak selalu, dalam sentra industri ada juga penyuplai bahan baku, alat-alat produksi dan mesin, komponen-komponen, subkontraktor.

Pada saat memulai investasi, lebih baik memperhatikan pengelompokan jenis industri pada daerah sentra industri tersebut. Adapun daerah yang memiliki pengelompokan jenis industri biasanya memiliki keunggulan, seperti:⁴⁴

- a. Sumber daya manusia yang terlatih.
- b. Sumber material (bahan baku) relatif lebih mudah dan juga murah.
- c. Bahan baku pendukung usaha utama yang relatif mudah diperoleh.
- d. Pasar produk mudah diakses calon konsumen.

F. Kerupuk Gadung

1. Pengertian Kerupuk Gadung

Gadung adalah salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang tumbuh liar di hutan-hutan, pekarangan maupun perkebunan. Batangnya bulat, berbulu dan berduri yang tersebar sepanjang batang dan tangkai daun. Umbinya bulat diliputi rambut akar yang besar dan kaku, kulit umbi berwarna gading atau coklat muda, daging umbinya berwarna putih gading atau kuning. Umbinya muncul dekat permukaan tanah. Dapat dibedakan dari jenis-jenis dioscorea lainnya karena daunnya merupakan daun majemuk

⁴⁴*Ibid.*, Ahmad Subagyo, *Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi*, ..., hal. 50.

terdiri dari 3 helai daun bunga tersusun dalam ketiak daun, berbulit, berbulu dan jarang sekali dijumpai.

Umbi gadung merupakan salah satu sumber pangan berkarbohidrat tinggi. Gadung dapat memenuhi kebutuhan energy tubuh. Karbohidrat dalam gadung di dominasi oleh pati. Selain itu memiliki kandungan karbohidrat juga mengandung racun sianida yang dapat menyebabkan keracunan dan mematikan. Sehingga perlu dilakukan beberapa proses untuk menghilangkan kandungan residu HCN atau meminimalkannya sehingga umbi gadung menjadi aman dan layak untuk dikonsumsi.⁴⁵

Kerupuk Gadung adalah krupuk yang dibuat dari umbi gadung sebagaimana bahan baku krupuk ini harus melalui proses yang panjang sebelum akhirnya menjadi krupuk gadung (krupuk yang belum digoreng), mulai dari pengupasan, pengirisan, melumuri umbi gadung dengan abu kayu, dijemur. Sebenarnya umbi ini mengandung zat yang memabukkan, sehingga untuk menjadikannya krecek, harus melalui proses pemeraman menggunakan abu untuk menghilangkan getahnya.

2. Manfaat Gadung

Terdapat beberapa manfaat yang terkandung dalam umbi gadung, antara lain:⁴⁶

- a. Sebagai bahan makanan pokok

⁴⁵ Siwi Ratna Sumunar dan Teti Estiasih, “*Umbi Gadung (Dioscorea Hispida Dennst) Sebagai Bahan Pangan Mengandung Senyawa Bioaktif*”, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, FTP Unirvesitas Brawijaya Tulungagung, Vol. 3 No. 1, (2015), hal. 109.

⁴⁶Yuli yana, *manfaat umbi gadung bagi kesehatan*, <https://manfaat.co.id/manfaat-umbi-gadung>, diakses pada tanggal 09/02/2020 pukul 09.02.

Manfaat pertama dari gadung adalah sebagai salah satu sumber utama dari makanan pokok, dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu pengganti nasi. Meskipun memiliki racun, namun demikian, racun dari umbi gadung dapat di netralisir apabila diolah dengan baik. Maka, gadung dapat dibuat menjadi salah satu sumber makanan pokok pengganti nasi yang nikmat, gurih, dan juga lezat.

b. Sebagai tambah energi dan kalori

Dengan mengkonsumsi gadung, anda akan memperoleh energy yang besar. Hal ini disebabkan karena, sebagai salah satu jenis umbi – umbian, gadung memiliki kandungan kalori yang tinggi. Kandungan kalori yang tinggi inilah yang dapat memberikan energy lebih bagi tubuh kita dalam melakukan aktivitas kita sehari – hari. Selain itu, kandungan kalori pada gadung juga hampir mirip dengan kandungan kalori pada umbi – umbian lainnya, seperti singkong, talas dan juga kentang.

c. Sebagai olahan (Krupuk Gadung)

Bagi anda yang senang dengan aneka camilan, terutama untuk menemani santai anda di sore hari dan juga hari libur, anda dapat mencoba gadung sebagai camilan. Saat ini, gadung sudah banyak diolah dalam bentuk krupuk dan keripik, sama seperti talas, singkong, kentang dan jenis umbi – umbian lainnya. Biasanya, olahan krupuk dan keripik dari umbi jenis gadung dan semacamnya memiliki rasa yang asin dan juga gurih, sehingga sangat nikmat untuk disantap.

d. Sebagai pestisida dan insektisida

Merupakan salah satu manfaat dari tanaman gadung yang saat ini sering digunakan dalam pertanian. Ya, sifat alami dari gadung yang memang memiliki racun, membuat tanaman umbi – umbuan ini menjadi salah satu bahan baku dari pembuatan pestisida dan juga insektisida, terutama pada perkebunan. Dengan menggunakan tanaman gadung sebagai bahan baku, maka para hama yang ada di kebun, terutama tikus, dapat dibasmi dengan mudah, sehingga tanaman perkebunan akan aman dari gangguan hama.

e. Dapat menyembuhkan Reumatik

Ternyata, meskipun beracun, tanaman gadung memiliki manfaat yang baik untuk menyembuhkan reumatik. Ya, reumatik merupakan salah satu jenis penyakit generative, yang muncul seiring dengan bertambahnya usia. Dengan mengkonsumsi gadung, maka gejala – gejala dari penyakit reumatik yang sering muncul dapat dicegah dan juga dapat sembuh sehingga anda tidak akan repot lagi berurusan dengan reumatik.

f. Dapat menyembuhkan kejang dalam perut

Gadung juga memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan lambung kita. Disinyalir bahwa, gadung dapat membantu mencegah dan menyembuhkan gejala kejang – kejang otot pada bagian perut. Kejang – kejang pada otot bagian perut ini sangatlah mengganggu, karena akan menyebabkan bagian perut menjadi sangat sakit dan juga menyiksa, serta dapat mengganggu kelancaran dari proses pencernaan di dalam tubuh.

g. Menyembuhkan luka bernanah

Gadung juga dapat membantu untuk menyembuhkan luka bernanah. Cara yang paling mudah adalah anda cukup menempelkan umbi gadung pada bagian luka yang bernanah. Hal ini dapat membantu mempercepat penyembuhan pada luka yang bernanah.

h. Menurunkan kadar kolesterol

Penyakit kolestrol yaitu kadar kolestrol jahat yang tinggi, tanam umbi gadung dapat membantu anda. gadung memiliki sifat alami yang mampu mengontrol dan juga menurunkan kadar kolestrol jahat di dalam tubuh anda, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh anda yang memiliki gangguan pada kadar kolestrol di dalam tubuh.

G. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai pendampingan dan pembinaan badan usaha milik desa banyak dilakukan dan dipublikasikan dalam berbagai karya, baik dalam bentuk jurnal maupun hasil penelitian seperti skripsi. Penelitian tersebut dihasilkan oleh beberapa peneliti yang salah satunya seperti:

Pertama, penelitian Adhe Filima Fadirianto dan Moehammad Soe' oed Hakam⁴⁷ yang berjudul *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)*. Jenis penelitian yang digunakan dalam

⁴⁷ Adhe Filima Fadirianto dan Moehammad Soe' oed Hakam, Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 58 (1), Mei, 2018, hal. 147-155.

penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian di dalam penelitian ini terletak pada peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang yaitu pada kegiatan pelatihan, promosi, dan *monitoring*. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bukan merupakan masalah yang relatif besar. Hambatan tersebut, sesuai dengan hasil wawancara narasumber, yaitu kurangnya antusias peserta pelatihan, motivasi peserta pelatihan yang tidak sesuai dengan harapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan sulitnya pelaku IKM untuk diajak berkembang. Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan berbeda menyesuaikan dengan hambatannya.

Dalam kajian jurnal tersebut memiliki perbedaan terhadap kajian yang akan peneliti lakukan. Dalam kajian yang peneliti lakukan bukan berfokus kepada dinas perindustrian tetapi lebih kepada badan usaha desa atau BUMDes. Dimana lebih mengangkat tentang usaha yang dijalankan oleh pemerintah desa dengan bantuan modal dari BUMDes.

Sedangkan persamaan antara kajian jurnal tersebut dengan kajian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang peran suatu

organisasi terhadap pengembangan suatu usaha. Yaitu mengembnagkan dengan jalan pendampingan dan pembinaan terhadap usaha tersebut.

Kedua, penelitian Dida Rahmadanik⁴⁸ yang berjudul *Peran BUMDES dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*. Pada jurnal tersebut membahas tentang Peran bumdes dalam pemberdayaan masyarakat kabupaten di Pacitan Ngadirojo. Orang-orang di Desa Cokrokembang memiliki banyak bisnis, baik di bidang pembuatan batu bata, pembuatan batik, pembuatan sapu, sablon, pembuat kue. Namun hingga kini bisnis mereka masih dikelola secara mandiri. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pelaku usaha dan dengan Desa Cokrokembang. Hingga saat ini yang telah berjalan hanya untuk unit simpan pinjam. Bumdes belum berperan dalam meningkatkan promosi dan pemasaran produk dari komunitas Cokrokembang. Jika Bumdes di desa Cokrokembang dikelola dengan baik maka diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam hal ekonomi.

Dalam kajian jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan kajian yang dilakukan peneliti, bahwa dimana dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang peran BUMDes yang belum bekerja secara maksimal dalam mengembangkan usaha yang ada, padahal terdapat banyak usaha-usaha rumah tangga yang ada. Sedangkan dalam kajian yang dilakukan peneliti mengarah kepada peran

⁴⁸ Dida Rahmadanik, *Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/download/1293/1094>, diakses pada tanggal 10/02/2020 pukul 10.02.

BUMDes yang telah dilakukan secara maksimal dan mampu mengangkat usaha rumah tangga menjadi sebuah sentra industri di daerah tersebut.

Sedangkan persamaan antara jurnal dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang peran BUMDes dalam mengembangkan atau memberdayakan masyarakat melalui usaha yang ada pada daerah tersebut. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui bantuan modal ataupun kegiatan sosial lainnya, seperti pendampingan dan pembinaan usaha.

Ketiga, penelitian Zulifah Chikamawati⁴⁹ yang berjudul Peran BUMDes dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. Jurnal tersebut membahas tentang ekonomi pedesaan masih menjadi kendala dalam kehidupan penduduk desa. Paradigma yang dibangun di masyarakat pedesaan adalah kemiskinan, kemunduran, keterbelakangan, dan berbagai bentuk diskriminasi terhadap pembangunan dan pertumbuhan masyarakat pedesaan. Aspek yang paling mendasar adalah ketidakmampuan masyarakat pedesaan untuk mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan dan membangun ekonomi lokal dengan berbagai perspektif dan metode. Meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 Tentang Desa memberikan pilihan yang diharapkan membentuk BUMDes desa pemerintah

⁴⁹ Zulifah Chikamawati, Peran BUMDes dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/603>, diakses pada tanggal 10/02/2020 pukul 10.18.

(perusahaan milik desa). BUMDes menyediakan ruang seluas mungkin bagi pemerintah desa untuk mengatur potensi lokal mandiri dan inovasi dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebanyak 1,4 Miliar dana untuk pembangunan pedesaan secara efektif dan efisien, termasuk infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan program kesejahteraan bagi penduduk desa. untuk berkembang menjadi konkrit dan komprehensif. Optimalisasi BUMDes dengan membangun kepercayaan kepada masyarakat melalui partisipasi aktif secara paralel yang dapat dilakukan bersama. BUMDes mengakomodasi semua komponen hasil potensial lokal untuk dikelola dan dikembangkan menjadi produk unggulan sebagai proses pembangunan ekonomi masyarakat. Produk unggulan yang dikembangkan melalui BUMDes dapat dipasarkan secara nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas potensi lokal. Oleh karena itu, BUMDes akan menjadi pusat perekonomian masyarakat pedesaan untuk pembangunan nasional. Pembangunan bangsa harus dimulai dari pembangunan desa sebagai ujung tombak pemerintahan. Kembali ke desa untuk membangun desa menjadi lebih baik.

Perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini adalah pada jurnal tersebut lebih menekankan kepada pembangunan desa secara mandiri, sedangkan pada penelitian ini menekankan kepada pengembangan usaha secara mandiri tetapi dengan pendampingan dan pembinaan dari BUMDes serta lembaga lainnya yang berkaitan.

Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menjadikan potensi lokal sebagai aset yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, penelitian Dessy Innie Syafitri dan Suhanadji⁵⁰ yang berjudul *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Melakukan Pendampingan Usaha Kerajinan Tangan Guna Memberdayakan Warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya penyandang disabilitas (tunagrahita) di Desa Karangpatihan yang dipandang sebelah mata. Akibatnya mereka menjadi semakin terpuruk dengan anggapan masyarakat yang seperti itu. Dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, pemerintah desa memanfaatkan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan dan mengembangkan produksi kerajinan tangan warga tunagrahita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pendampingan usaha kerajinan tangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada warga tunagrahita serta keberdayaan warga tunagrahita setelah mendapatkan pendampingan usaha kerajinan tangan. Pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pendampingan usaha kerajinan yang diberikan oleh BUMDes yaitu (1) Fasilitasi, (2) Penguatan, (3) Perlindungan dan (4) Dukungan. Keberdayaan warga tunagrahita dapat dilihat dari memiliki kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-

⁵⁰ Dessy Innie Syafitri dan Suhanadji, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Melakukan Pendampingan Usaha Kerajinan Tangan Guna Memberdayakan Warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*,

sumber yang ada di masyarakat, memiliki aktivitas ekonomi dan kemampuan menyiapkan hari depan keluarga.

Dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu jika dalam penelitian diatas adalah pengembangan usaha kerajinan tangan yang dilakukan oleh warga tunagrahita, sedangkan pada penelitian ini merupakan suatu pengembangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) pada industri kerupuk gadung yang dilakukan oleh warga masyarakat.

Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan usaha atau industri pada suatu daerah tertentu.

Kelima, penelitian Kadek Sumiasih⁵¹ yang berjudul *Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)*. Pariwisata di Bali memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebab sangat banyak desa di Bali yang memiliki potensi wisata dan membutuhkan pengelolaan yang efektif guna kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya melalui BUMDes. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) telah membuat kebijakan agar desa dapat mendirikan BUMDes, namun di Bali masih terdapat desa yang belum memiliki BUMDes terlebih pada desa yang memiliki potensi wisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi BUMDes pasca diundangkannya Undang-Undang Desa dan eksistensi BUMDes di Bali pada

⁵¹<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luar-sekolah/article/view/28470>, diakses pada tanggal 18/02/2020 pukul 9.53.

khususnya serta menganalisis bentuk pengelolaan sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi BUMDes Pasca berlakunya Undang-Undang Desa telah mengalami perkembangan, namun masih terdapat desa di Bali, termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUMDes. Hingga awal tahun 2018, dari 636 desa, baru 455 desa yang memiliki BUMDes dan hanya 13 BUMDes yang mengelola potensi wisata. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengelola usaha serta belum maksimalnya pendampingan dari pihak pemerintah. BUMDes Pakse Bali mampu mengelola sektor pariwisata desanya dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan dengan memperhatikan jenis sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur sehingga dapat menjadi contoh untuk desa lain yang belum mampu mengelola potensi wisatanya.

Dalam kajian jurnal tersebut memiliki perbedaan terhadap penelitian ini, dimana penelitian diatas menjelaskan tentang peran BUMDes dalam mengelola sektor pariwisata yang ada, sedangkan pada penelitian ini menjelaskan tentang peran BUMDes dalam pengelolaan usaha-usaha mikro untuk menunjang keberlangsungan perekonomian masyarakat serta pengembangan usaha tersebut.

Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menjelaskan tentang peran BUMDes dalam mengelola suatu aset atau produk lokal pada suatu wilayah tersebut. Dimana tujuannya adalah sama, yaitu meningkatkan atau mengembangkan potensi tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keenam, penelitian Muh. Ridwan, Hartuningsih, dan Mass'ad Hatuwe⁵² yang berjudul *Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang*. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang pembinaan Industri Kecil dan Menengah di Kota Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang secara umum sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan usaha pelaku IKM, namun secara aplikatif namun hasil yang dicapai belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal. Meski demikian upaya pembinaan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang terhadap IKM terus dilakukan secara berkesinambungan serta berjalan dengan baik. Adapun faktor yang menghambat terhadap pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah kurangnya jumlah aparat Pembina IKM khususnya tenaga penyuluh dan pendamping, sebagian aparat Pembina IKM yang ada di Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang tidak

⁵²Muh. Ridwan, Hartuningsih, dan Mass'ad Hatuwe, Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang, *Jurnal Administrative Reform*, Vol.2(2), -, 2014, hal. 187.

sesuai dengan kompetensi (basic pendidikan yang dimiliki), terbatasnya kemampuan aparat pembina IKM, terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan IKM sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana, adanya sikap dan perilaku IKM yang terkesan manja sehingga selalu mengharapkan bantuan pemerintah, karakteristik dan pola pikir pelaku IKM tidak mudah untuk berubah, kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam kajian jurnal diatas memiliki perbedaan dengan kajian penelitian yang dilakukan peneliti. Dimana perbedaan tersebut terletak pada salah satu variabel yang tidak ada dalam penelitian itu, yaitu pendampingan. Dimana dalamkajian jurnal tersebut hanya mengkaji tentang pembinaa suatu lembaga terhadap suatu industri kecil dan menengah, sedangkan pada penelitian ini menggabungkan antara pendampingan dan pembinaan.

Sedangkan persamaannya adalah bahwa sama-sama membahas tentang suatu peran pembinaan suatu lembaga dengan tujuan untuk mengembangkan suatu industri kecil dan menengah yang ada dalam suatu wilayah tersebut dengan menggandeng beberapa lembaga lain sebagai mitra kerjasama suatu lembaga.

Ketujuh, Penelitian Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani⁵³ yang berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk menganalisis peran BUMDES

⁵³Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani <http://ejournal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/602>, diakses pada tanggal 23 Januari 2021, pukul 18.06.

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian pada BUMDES Genta Persada Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. Dari penelitian yang telah diadakan penulis, penulis mendapatkan hasil bahwa BUMDES dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melewati program-program yang dilaksanakan serta BUMDES dapat menyerap tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran. Kemudian dari faktor pendukungnya adalah adanya suatu potensi yang sangat berkembang di wilayah itu, sehingga dengan perbantuan unit-unit usaha ini akan lebih mengembangkannya. sedangkan dari faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program-program BUMDES, serta kurang tertariknya masyarakat untuk bekerja pada bidang keuangan kecil seperti BUMDES.

Dalam Penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengolah program yang dipunyai beserta faktor pendukung serta penghambatnya.

Sedangkan perbedaannya adalah Pada jurnal penelitian tersebut menjelaskan tentang peran BUMDES terhadap keberadaan seluruh masyarakat, baik perempuan ataupun laki-laki. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada suatu pemberdayaan kelompok perempuan dengan pengelolaan program Simpan Pinjam khusus Perempuan pada Badan Usaha Milik Desa.

Kedelapan, Penelitian I Made Suryana, Tri Joko Setiyono, C. Sri Murdoyuwono⁵⁴ yang berjudul Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Pada jurnal tersebut menjelaskan tentang suatu pemberdayaan yang penting untuk dilakukan baik untuk kelompok perempuan maupun kelompok laki-laki. Pemberdayaan ini memiliki tujuan untuk menciptakan kearifan lokal serta menumbuhkan ekonomi kreatif. Pada jurnal tersebut memfokuskan pada pemberdayaan-pemberdayaan melalui peternakan maupun perikanan. Dimana hal ini melihat potensi yang tumbuh pada daeran tersebut. Dimana jurnal penelitian ini mengambil wilayah IW yang terletak di Kabupaten Tabanan, yaitu di desa Lalanglinggah dan desa Tiyang Gading.

Antara jurnal penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan yang merujuk pada potensi lokal. Dimana dengan mengembangkan potensi lokal maka kehidupan masyarakatnya akan terjamin.

Sedangkan perbedaannya terletak pada potensi yang dikembangkan, dimana pada penelitian tersebut merujuk pada potensi peternakan dan perikananannya, sedangkan pada penelitian ini merujuk pada potensi lokal non hewani (umbi gadung).

⁵⁴I Made Suryana, Tri Joko Setiyono, C. Sri Murdoyuwono, <http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/Bakti/article/view/84>, diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 12.50.

H. Kerangka Berfikir Penelitian/Konseptual

